

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menggunakan empat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA Negeri 11 Jakarta secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan program di tingkat sekolah menunjukkan adanya keterkaitan antara komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung kelancaran implementasi program.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi kebijakan berlangsung melalui jalur formal yang terstruktur, mulai dari Dinas Pendidikan hingga pihak sekolah, kemudian diteruskan kepada guru, siswa, dan orang tua. Mekanisme komunikasi tersebut membantu menjaga konsistensi informasi yang diterima oleh pelaksana program. Namun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman di kalangan siswa dan orang tua, terutama terkait informasi teknis seperti perubahan status dalam sistem yang terintegrasi dengan mekanisme pusat.

Pada aspek sumber daya, pelaksanaan KJP di SMA Negeri 11 Jakarta didukung oleh adanya tim pelaksana di tingkat sekolah dengan pembagian tugas yang jelas serta dukungan sistem administrasi berbasis website yang terintegrasi dengan sistem Dapodik dan DTKS. Secara umum sumber daya yang tersedia dinilai cukup mendukung pelaksanaan program, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan waktu pengumpulan data serta gangguan sistem ketika diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna.

Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan program. Program KJP dipandang tidak hanya sebagai tugas administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab dalam membantu kebutuhan pendidikan siswa. Komitmen dan sikap profesional pelaksana menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan implementasi program di tingkat sekolah.

Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan KJP telah mengikuti tahapan administratif yang jelas sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Proses administrasi dilaksanakan melalui tahapan pendataan siswa, verifikasi dokumen, serta pengunggahan data ke dalam sistem yang terintegrasi dengan instansi terkait. Struktur birokrasi tersebut memberikan kepastian prosedural dalam pelaksanaan program. Namun demikian, ketergantungan terhadap sistem terpusat membatasi ruang keputusan pihak sekolah ketika terjadi kendala teknis atau ketidaksesuaian data dalam sistem.

Dengan demikian, implementasi Program KJP di SMA Negeri 11 Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti perbedaan tingkat pemahaman informasi teknis di kalangan penerima manfaat, gangguan teknis pada sistem administrasi, serta keterbatasan kewenangan sekolah dalam melakukan penyesuaian terhadap data penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sistem administrasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA Negeri 11 Jakarta, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

1. Penguatan Sosialisasi dan Penyederhanaan Informasi Teknis

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk meningkatkan kualitas sosialisasi terkait mekanisme teknis Program KJP, khususnya mengenai perubahan status penerima dalam sistem. Informasi teknis yang disampaikan kepada sekolah sebaiknya dilengkapi dengan panduan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh siswa serta orang tua.

Penyediaan panduan tertulis atau media informasi yang lebih ringkas dapat membantu meminimalkan kesalahpahaman dalam proses administrasi program.

2. Peningkatan Koordinasi antara Sekolah dan Instansi Pengelola Program

Dinas Pendidikan bersama instansi pengelola program perlu memperkuat koordinasi dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan administrasi KJP. Koordinasi yang lebih intensif dapat membantu sekolah dalam memahami perubahan mekanisme program serta mempermudah proses penyelesaian kendala yang muncul pada tahap pendataan dan verifikasi data siswa.

3. Peningkatan Stabilitas Sistem Administrasi Program

Instansi pengelola Program KJP perlu meningkatkan stabilitas sistem berbasis website yang digunakan dalam proses administrasi dan verifikasi data. Sistem yang stabil sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pengunggahan dokumen oleh operator sekolah, terutama pada periode pengumpulan data ketika akses sistem dilakukan secara bersamaan oleh banyak sekolah.

4. Peningkatan Validasi dan Akurasi Data Penerima Bantuan

Pemerintah daerah melalui instansi terkait juga perlu memperkuat proses validasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi siswa. Peningkatan akurasi data ini penting untuk memastikan bahwa bantuan KJP dapat tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.

Secara umum, pelaksanaan Program KJP di SMA Negeri 11 Jakarta telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun demikian, peningkatan pada aspek sosialisasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, stabilitas sistem administrasi, serta validasi data penerima bantuan diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas implementasi program di tingkat sekolah.